

EDUKASI PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT WAJIBAH DI DESA GELANG KRAJAN KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Imam Zarkasi¹, Mochammad Anang Faro'iq²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

zarkasi10um@gmail.com¹, anang156@gmail.com²

Kata Kunci :

Sistem Penyelesaian,
Wasiat.

Abstrak

Wasiat adalah sesuatu yang diberikan ketika si pemberi telah wafat. Hal yang menarik dalam pembahasan ini ialah bahwasanya pembagian wasiat masih banyak kekeliruan dan masyarakat masih dominan menyelesaikannya kepada tokoh agama. Maka dari itu penulis disini mengangkat rumusan masalah: (1). Bagaimana sistem peran kiai terhadap penyelesaian wasiat wajibah (studi kasus desa Gelang Krajan kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember), (2). Bagaimana pendapat kiai dalam penyelesaian wasiat wajibah. Dengan tujuan agar (1). mengetahui tentang sistem peran kiai terhadap penyelesaian wasiat wajibah studi kasus desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, (2). mendeskripsikan tentang pendapat kiai dalam penyelesaian wasiat wajibah studi kasus desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember

Abstract

A will is something that is given when the giver has died. The interesting thing in this discussion is that there are still many mistakes in the distribution of wills and the community is still dominant in resolving them to religious leaders. Therefore, the author here raises the formulation of the problem: (1). How is the system of the kiai's role in the completion of the mandatory will (a case study in the village of Bracelet Krajan, Sumberbaru district, Jember district), (2). What is the opinion of the kiai in the settlement of mandatory wills? With the aim that (1). knowing about the system of the kiai's role in the completion of the mandatory will case study in the village of Bracelet, Sumberbaru sub-district, Jember district, (2). describes the opinion of the kiai in the completion of the mandatory will case study in the village of Bracelet, Sumberbaru sub-district, Jember district.

System Settlement, Will.

Corresponding Author:

Imam Zarkasi, Mochammad Anang Faro'iq

Email: zarkasi10um@gmail.com, anang156@gmail.com

PENDAHULUAN

Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah satunya adalah masalah wasiat. Di Indonesia, seperti diketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli di samping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing juga merupakan pemeluk agama yang berbeda namun Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum atau disebut Syariat Islam yang banyak diikuti oleh penganutnya sehingga memiliki pengaruh kuat dalam hukum waris di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus relevan dan tidak mengandung kemudlaratan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.¹

Menyadari sepenuhnya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren bersumber pada ajaran agama Islam, dalam rangka membangun masyarakat untuk memperkuat kehidupan sosial dalam menghadapi dunia modern. Sedangkan keberadaan pondok pesantren disamping sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga masyarakat telah memberi warna dan corak yang khas khususnya masyarakat Islam Indonesia, sehingga pondok pesantren dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat sejak berabad-abad lamanya. Oleh karena itu kehadiran pondok pesantren dapat diterima oleh masyarakat sampai saat ini.²

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang dinuzulkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam boleh diketahui dalam ajarannya yang termasuk dalam Al-qur'an dan As-sunnah dimana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Perkara-perkara antara manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan Ahkam al-Muamalat dimana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hokum orang dan keluarga (al-ahwal al-Syakhsiyyah), hukum pidana (al-ahkam aljinayah), hukum acara (al-ahkam al-qadha wa al-murafat) dan hukum benda (al-ahkam al-madaniyyat) yaitu hukum-hukum yang mengatur

¹AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005). h. 77

²Moh. Idris, *Sistem Pendidikan Pesantren*, (Sumenep: Mutiara Press, 2011), h. 4

masalah yang berkaitan tentang dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjammeminjam, penyelesaian waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.³

Pengadilan Agama secara resmi diakui sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman melalui Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Secara bersamaan hukum Islam diposisikan sebagai subsistem hukum nasional.⁴ Namun Peradilan Agama pada saat itu berada dalam kondisi dilematis. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan peradilan agama dipandang sebelah mata. Masyarakat menganggap bahwa peradilan agama bukanlah suatu lembaga yang memiliki atribusi kekuasaan kehakiman melainkan peradilan yang hanya pantas bagi kalangan santri dan kiai.⁵

Sosok kyai pada satu sisi di tengah masyarakat adalah golongan terpelajar pada tingkat desa, bahkan lebih dari itu. Posisi keilmuan kyai, dengan demikian, dalam beberapa hal, unggul dibandingkan dengan rata-rata masyarakat di mana kyai dan pesantrennya berada. Posisi demikian inilah maka sejarah telah menempatkan para kyai sebagai kelompok yang terhormat, sekalipun dalam perspektif sosiologis, kyai juga dikatakan sebagai elite tradisional karena kedudukannya yang umumnya berada di desa-desa sebagai penyaring kebudayaan luar ke dalam lingkungan masyarakat.⁶

Mengenai keberadaan dari wasiat ini Ulama’ fiqih mendefinisikan wasiat dengan artian sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁷

Menurut arti kata wasiat dapat pula berarti nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada di dunia.⁸ Kata wajibah atau wajib berarti, harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Menurut Mukhtar Yahya yang dikatakan wajib ialah suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan apabila perbuatan itu ditinggalkan oleh seseorang, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.⁹

Wasiat itu sendiri adalah suatu tasharruf terhadap suatu harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Singkat

³Salman, *Hukum Waris*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h. 65

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

⁶H. Samsul Nizar, *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 201

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevep. 1926), h. 45

⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Cet. II.; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 87.

⁹Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1006.

kata adalah pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.¹⁰

Dasar hukum wasiat banyak dijumpai didalam ayat alqur'an dan hadist Rasulullah saw, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada kerabatnya atau orang lain yang telah berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang tersebut tersisih dari pembagian harta warisan.¹¹

Dari beberapa dalil tentang wasiat, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa status hukum wasiat itu tidak mengandung hukum fardhu „ain, baik wasiat kepada orang tua maupun kepada kerabat yang menerima warisan atau kerabat jauh yang tidak menerima warisan.¹² Lain halnya dengan Imam Azzuhri dan Imam Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Sementara ahli hukum dikalangan mazhab Masruq, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang wajib wasiat tersebut adalah hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Bahkan Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah fardhu ain. Mereka beralasan dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12.¹³

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَمَا لَكُمْ مِنَ أَمْوَالِكُمْ ۖ وَلِلْأَنْثَىٰ مِثْلُ مَا لِلزَّكَرِ ۚ﴾¹¹
وَإِذَا فَلَاحُ النَّاصِفِ وَلِوَيْهِ لَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أُتُوهَا فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْإِخْوَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّيْهِ يَوْصِي بِهَا أَوْ ذِي رَحْمَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَلِلْأَبَائِكَ وَالْأُمَّهَاتِ السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كُنَّ حَيًّا فَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّا كَانَ عَلَىٰ مَا حَكَی "مَا ۱۱﴾

Artinya: Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing

¹⁰Teungku Muhammad Ash-shiddieqy, *Fikh Mawarris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 261

¹¹A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130.

¹²Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran* (Beirut : Kitab al-Arabi, 1973), 216-217.

¹³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke 2 (Bandung : Pustaka alMa'arif, 1981), 78.

Berdasarkan qarinah-qarinah ini jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunat. Namun

kewajiban wasiat tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang belum (harus) ditunaikan seperti utang yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dibayar.¹⁴

Diskursus masalah wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam kajian hukum Islam, baik dalam arti wasiat maupun ketika ia ditambahkan kalimat wajibah.¹⁵

Wasiat Wajibah merupakan pranata untuk unuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah menyeluruh persoalan kematian lebih dulu daripada pewaris, dalam garis lurus kebaawah, garis lurus keatas maupun garis ke samping.¹⁶

Wasiat wajibah merupakan sebuah upaya dari pembaharuan hukum Islam di dunia Islam yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya ketidakjelasan terhadap pembagiannya, dan bisa jadi konsensus ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan-peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946.¹⁷

Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai zawil arham. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.¹⁸ Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik al-Qur'an maupun hadis.¹⁹ Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak tiri sama sekali tidak disinggung oleh KHI.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama

¹⁴Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 191.

¹⁵M. Fahmi Al Amruzi, *"Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam"* (Cet. I; Jakarta: 2012), h. 13.

¹⁶Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 151

¹⁷M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012), h. 13

¹⁸Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 87.

¹⁹Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), h. 264.

berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.²⁰ Oleh karena masalah wasiat juga termasuk masalah warisan maka seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan para ahli waris dan kaum kerabat yang ditinggalkan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.²¹

Membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, pembatasan ini dilakukan karena peran kiai yang menjelaskan pembatasan pemberian wasiat wajibah sesuai dengan Al-Qur’an Al-Baqarah 2:180 mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternanif pemberian kepada cucu laki-laki dan perempuan dari garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris atau ahli waris yang lain. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dari orang yang meninggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Untuk mengetahui pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi atau terminologi, yaitu: Pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi adalah Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan.²² Kata wasiat disebut dalam al-Qur’an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam al- Qur’an sebanyak 25 kali.²³ Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.²⁴

Dalam al-Qur’an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara arti kata wasiat tersebut antara lain:

Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah:

²⁰Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148.

²¹Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h. 98.

²²Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), h. 220

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000), h. 438

²⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 131

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (١٣)

Artinya: Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima agama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima agama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada agamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat). [Ash-Shura: 13]²⁵

Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 180

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١٨٠)

Artinya: Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. [Al-Baqara: 180]²⁶

Menunjukkan makna nasihat menasihati sebagaimana firman Allah:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (٣)

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. [Al-Asr: 3]²⁷

Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمَيْنِ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (١٤)

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). [Luqman: 14]²⁸

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 785

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 44

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 109

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 654

Pengertian wasiat ditinjau dari segi terminology di dalam terminology ini, hukum perdata positif, sering disebut dengan testament. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsip antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.²⁹

Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.³⁰

Menurut ulama Hanabilah wasiat didefinisikan sebagai berikut: Wasiat suatu perintah dengan mentasarufkan harta benda setelah orang yang berwasiat itu meninggal, seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya.

Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatannya lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang utang dan manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah 14 bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat.³¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. T. M. Hasby ash Shiddieqy, wasiat adalah suatu tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.³²

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Dasar Hukum Wasiat

Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَ "يُرَا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالِ الْفَرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"﴾ (١٨٠)

Artinya: Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. [Al-Baqara: 180]³³

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا "جَا وَصِيَّةً" لِرُؤَاغِهِمْ مَنَّا "عَا إِلَى الْوَلِّ غَيْرِ إِخْرَاجٍ"﴾
﴿عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّ عَزِي ز حَكِي م ٢٤٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000), h. 439

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1926

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: al Ma'arif, 1987), h. 230

³² T.M. Hasby ash Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h 300

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 44

nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (wahai wali waris si mati) mengenai apa yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [Al-Baqara: 240]³⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ النِّسَاءِ فَإِنْ كَانَ نَسَاءٌ فَلَهُنَّ كَمَا كَانَ لَأَبَائِهِنَّ وَلَهُنَّ كَمَا كَانَ لَأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ كَانَ وَلَدٌ فَلَهُ كَمَا كَانَ لَأَبَائِهِ وَلَهُ كَمَا كَانَ لَأُمَّهَاتِهِ فَإِنْ كَانَ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَ تَدْرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعٌ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّ كَانَ عَلَىٰ مَا حَكَی (١١١)

Artinya: Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, yaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [An-Nisaa: 11]³⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخٌ ت فَلِأُولَئِكَ مِثْلُ حَقِّهِمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَاٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 59

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 117

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), h. 117

yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628).³⁷

Ijma

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukan adanya ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasulnya didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.³⁸

Al-Ma'qul (logika)

Menurut tabi'at manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah amal taqarrubnya kepada Allah yang telah dimilikinya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah saw.³⁹

EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah satunya adalah masalah wasiat.

Kami sebagai tim penyelenggara dalam hal ini kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat Gelang Sumberbaru melakukan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wasiat wajibah, melalui acara rutin yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Gelang setiap hari Kamis malam Jumat (yasianan) yang sudah mashur dilaksanakan masyarakat terutama masyarakat NU.

³⁷M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 21

³⁸M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 21

³⁹Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al maarif, 1981), h. 52



Kami sebagai fasilitator memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkenaan dengan wasiat yang sesuai dengan hukum Islam, karena selama ini pengaplikasian hukum wasiat tidak dilakukan dimasyarakat khususnya di Desa Gelang Krajan Sumberbaru Jember,

dikarenakan suatu kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh atau ketidak tahuan mereka terhadap hukum syariat Islam khususnya didalam masalah wasiat. Bahkan para tokoh masyarakat atau disebut dengan kiyai, tidak bisa menyelesaikan hal tersebut secara keseluruhan didalam kehidupan masyarakat, alasannya karena akan mengakibatkan hal-hal yang mungkin akan membahayakan kepada kiyai tersebut. Maka kami berinisiatif untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan kiyai/ tokoh masyarakat gelang yang dilaksanakan pada hari Kamis malam Jumat atau yasinan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana di atas, kiyai atau tokoh masyarakat perannya sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat awam, karena setelah kami memberikan pemahaman kepada masyarakat, memang mayoritas penduduk desa tersebut minim akan ilmu pengetahuan lebih-lebih masalah hukum syariat Islam. Akan tetapi jika seorang kiyai tersebut disegani baik dari segi keilmuannya atau lain sebagainya, maka masyarakat akan mengikuti apa yang beliau sarankan, jika sebaliknya maka bukan hanya hukum syariatnya saja yang ditinggalkan bahkan bisa jadi tokoh masyarakat atau kiyainya pun akan menjadi korban.

DAFTAR REFERENSI

Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab Cet. I; Jakarta, INIS, 1998

Al Amruzi, M. Fahmi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012

Anas, Malik bin, Al Muwatta', Beirut: Dar al Ahya al Ulum, t.t

- Anshary, Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- Cik, Hasan Bisri, et al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Dahlan, Abdul Aziz, Enşiklopedi Hukum Işlam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevep. 1926
- Daradjat, Zakiyah, Ilmu Fiqih III, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998
- Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Semarang: Al-Waah, 2000
- Fatkhurrahman, Ilmu Waris, Bandung: Al maarif, 1981
- Ghofur, M.Abdul, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Buku Islam Utama, 1998
- Hasan, M. Ali, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996) Al Amruzi, M. Fahmi, “Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam” Cet. I; Jakarta: 2012
- Idris, Mohammad, Sistem Pendidikan Pesantren, Sumenep: Mutiara Press, 2011
- Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz III, Beireut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t
- Lofland, John & Lyn H.Lofland, Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, Fiqh Lima Madzab, Jakarta: Center basitama, 2002
- Muhibbin, Mohammad, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Bandung: Tarsito, 1988
- Nizar, H. Samsul, Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Nusantara, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011
- Quthub, Sayyid, Tafsir fi Zhilalil Quran Beirut : Kitab al-Arabi, 1973
- Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Cet. Ke 2 Bandung : Pustaka alMa`arif, 1981
- Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata BW, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000

- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 14, Bandung: al Ma`arif, 1987
- Salman, Hukum Waris, Bandung : PT Refika Aditama, 2009
- Siddieqy, T.M. Hasby ash, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Siddik, Abdullah, Hukum Waris Islam, Bandung: Bina Pustaka, 1984
- STISMU. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Lumajang: STISMU PRESS
- Subarsono, AG., Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*, 2005
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta, 2012
- Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cet. II, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984
- Usman, Suparman, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Radar Jaya, 2002
- Wahid, Muhibbin, Moh. Dan Abdul, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Yahya, Mukhtar dan Facthurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Yunus, A. Assaad, Hukum Kewarisan Islam Cet. I; Jakarta: PT. Alqushwa
- Zahari, Ahmad, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI Pontianak: Romeo Grafika, 2006